



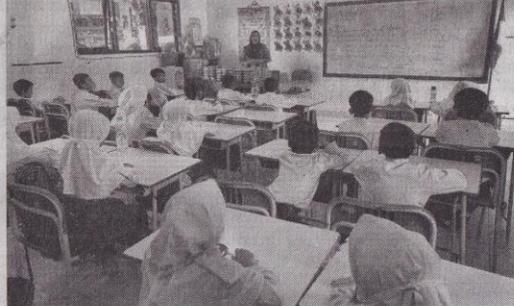
## Dana BOS Rp 87,5 Miliar Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

**GUNUNGKIDUL** - Meski kebijakan efisiensi anggaran memaksa banyak pos belanja pemerintah terpangkas, Dinas Pendidikan (Disdik) Gunungkidul memastikan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2025 tak ikut terpangkas.

Sekretaris Disdik Gunungkidul Agus Subaryanto mengatakan, dana BOS sebesar Rp 59.097.180.000 diperuntukkan bagi sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah swasta mencapai Rp 28.435.240.000.

"Total dana BOS yang diterima tahun ini senilai Rp 87,5 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP, hingga SMA/SMK," ujar Agus kepada awak media, Jumat (21/2).

Agus menuturkan, penyaluran dana BOS dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama disalurkan sebesar



ANDI MAY/RADAR JOGJA

**DI KELAS:**  
Seorang guru berdiri di depan kelas saat kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 1 Wonosari, Gunungkidul.

50 persen dari total anggaran, dan tahap kedua 50 persen sisanya. Namun, terdapat ketentuan bahwa penyaluran tahap kedua hanya dapat dilakukan jika serapan anggaran tahap pertama telah mencapai 75 persen.

Pihaknya selalu berpedoman pada petunjuk teknis dan regulasi yang berlaku dalam proses penyaluran dana BOS. "Untuk mengakses tahap kedua, minimal 75 persen dari anggaran tahap pertama harus sudah

terrealisasi," jelasnya.

Adapun besaran dana yang diterima setiap sekolah bervariasi, tergantung pada jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Pihaknya menyambut baik keputusan pemerintah yang tidak memangkas anggaran dana BOS. Menurutnya, dana ini sangat vital untuk menunjang operasional sekolah, seperti membiayai belanja non-personalia, kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, evaluasi pem-

belajaran, hingga pengembangan perpustakaan, termasuk pengadaan buku pelajaran dan modul ajar.

Dana BOS digunakan untuk membayar honorarium tenaga pendidik non-ASN atau guru honorer di sekolah. Selain itu, dana BOS juga digunakan untuk membayar honorarium tenaga pendidik non-ASN atau guru honorer di sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul Nunuk Setyowati mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar memanfaatkan dana BOS sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang mandiri, akuntabel, dan transparan agar dana yang telah disediakan pemerintah dapat memberikan hasil yang optimal. "Kami tekankan kepada pihak sekolah untuk bertanggung jawab, cermat, mengacu pada regulasi, serta melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan," tegas Nunuk. (ndi/pr/ab)



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

---